



ISTIMEWA

BPJS KETENAGAKERJAAN: Wabup Aloysius secara simbolis menyerahkan kartu peserta program jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara (PBASN) Kabupaten Sekadau, kemarin.

Non ASN Kini Miliki BPJS Ketenagakerjaan



SEKADAU - Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara (PBASN) Kabupaten Sekadau akhirnya memiliki kartu peserta program jaminan sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau. Hal tersebut dibuktikan Pemkab dengan Penyerahan Sertifikat dan Kartu Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Selasa (12/1).

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sekadau Aloysius didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sanggau, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.

Pada kesempatan itu, Wabup Aloysius menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat dan kartu peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara (PBASN), merupakan tindak lanjut dari kebijakan kerja

sama Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan BPJS Ketenagakerjaan. "BPJS dalam hal ini memberikan perlindungan hak-hak jaminan sosial pekerja berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," kata sosok yang karib disapa Bang Aloy tersebut.

Ia menjelaskan, iuran bagi kepesertaan pegawai bukan-ASN ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau, dengan dasar perhitungan iuran sesuai dengan gaji yang dibayarkan perbulan kepada PNASN. "Diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Sekadau bukan hanya untuk program JKK dan JKM saja tetapi juga dengan menambah program jaminan hari tua bagi para PNASN," harap dia.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Sanggau, Azwarsyah mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah program dari Pemer-

intah Pusat atau program negara. Program tersebut, menurut dia, sudah disusun dan diamanahkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia.

"Jadi siapa saja berhak mendapatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia, asal memiliki kegiatan ekonomi baik itu yang menerima gaji atau yang tidak mendapatkan gaji, untuk itu semua bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Azwarsyah.

"Alhamdulillah semua tenaga kontrak dari seluruh SKPD sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan jadi sudah terlindungi dan aman dalam bekerja," sambungnya.

Pada kegiatan tersebut dilakukan pemaparan materi sosialisasi program dari BPJS Ketenagakerjaan yang dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Wabup kepada beberapa peserta BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Pemkab. (var)